



PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis.

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat yang memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat. Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan prima bagi masyarakat di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan serta evakuasi dari bahaya kebakaran Gedung/Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan kebakaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai

dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal pelayanan masyarakat pada sub urusan kebakaran dan penyelamatan.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis karena melalui kebakaran Gedung/Pemukiman tersebut tertuang tantangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 - 3708 Tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1.3.1 Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat di bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan serta evakuasi dari bahaya kebakaran Bangunan/Gedung dan Pemukiman sesuai tugas dan fungsi yang di emban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis.

1.3.2 Tujuan :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan pekerjaan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 dapat terealisasi.
2. Menjadikan pedoman dan arah kebijakan dalam menetapkan besaran anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perubahan Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

B A B
2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 dan berdasarkan (Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2016) untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program/Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap kebakaran Gedung/Bangunan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan koordinasi yang diperlukan antar instansi/Lembaga terkait dalam penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Pemadam Kebakaran bersama Sekretaris. Kepala bidang dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam bidang kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan rencana kebijakan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembuatan laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

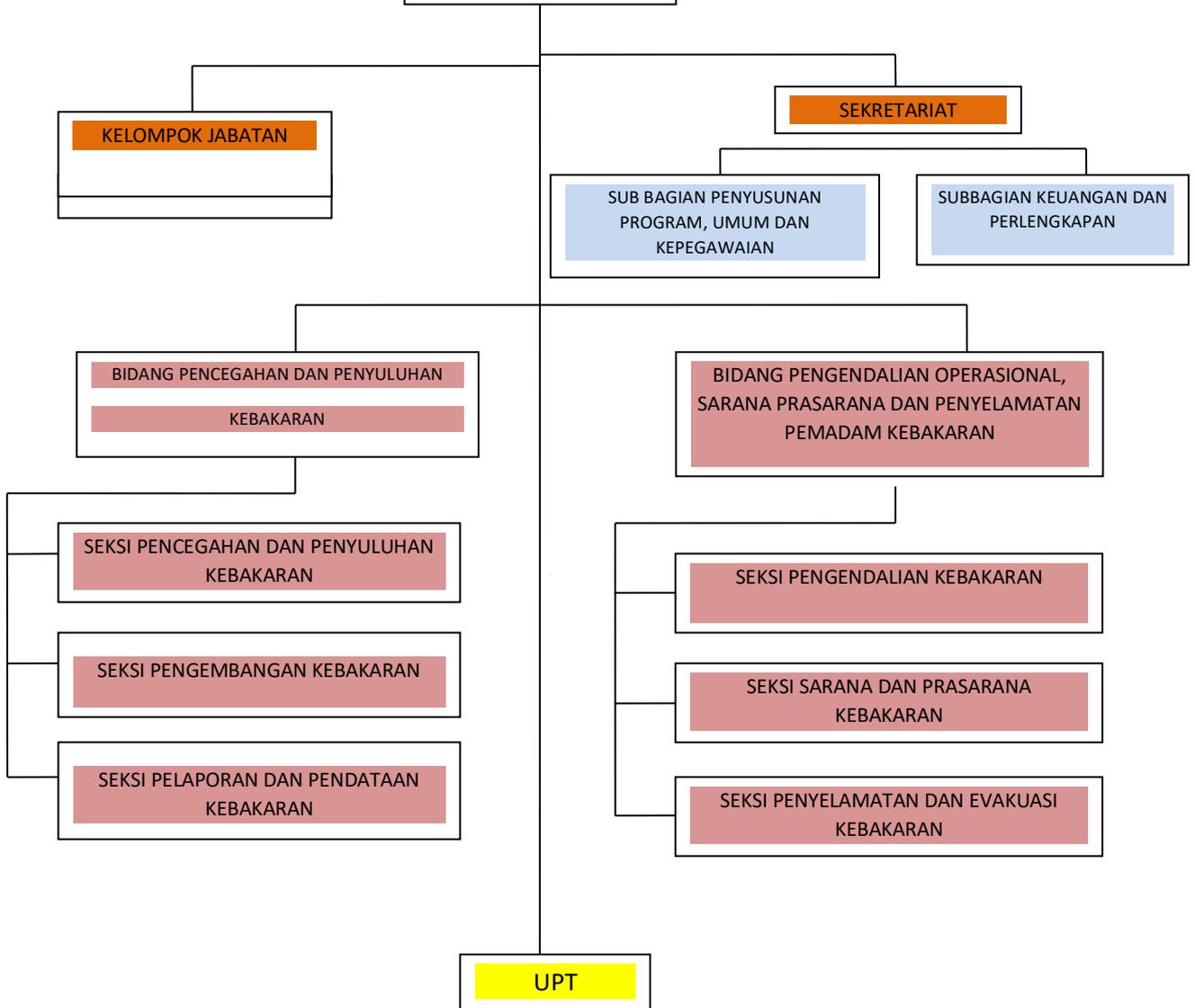
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BENGKALIS**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BENGKALIS



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 41 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016

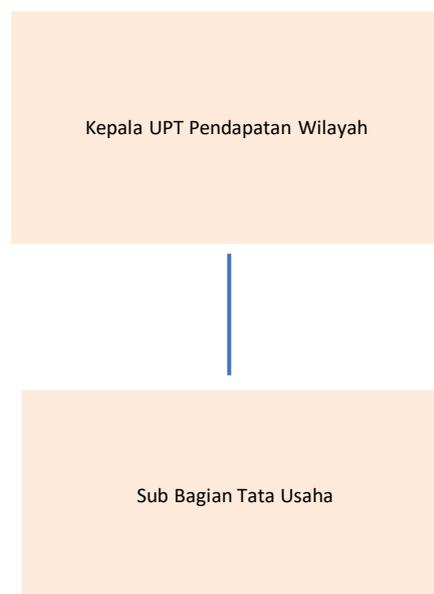


Sumber : Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2017, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dibentuk Unit Pelaksana

Teknis Pendapatan Wilayah (UPT). Adapun Struktur Organisasi UPT Wilayah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi UPT Wilayah



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana tersebut

merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah 39 orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 221 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT	8	3	11
2.	BID. PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN	5	-	-
3.	BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN	10	-	10
4.	UPT. DAMKAR KECAMATAN MANDAU	4	-	4
5.	UPT. DAMKAR KECAMATAN BUKIT BATU	5	-	5
6.	UPT. DAMKAR KECAMATAN RUPAT	1	-	1
7.	UPT. DAMKAR KECAMATAN PINGGIR	3	-	3
TOTAL		36	3	39

Sumber: Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 39 orang PNS dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, 36 orang adalah laki-laki dan 3 adalah perempuan.

Komposisi PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT		3	3	3
2.	BID. PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN		1	1	3
3.	BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN		7	1	
4.	UPT. DAMKAR KECAMATAN MANDAU		2	2	
5.	UPT. DAMKAR KECAMATAN BUKIT BATU		3	2	
6.	UPT. DAMKAR KECAMATAN RUPAT			1	1
7.	UPT. DAMKAR KECAMATAN PINGGIR		2	1	1
TOTAL		-	18	13	8

Sumber: Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III dan IV, yaitu mencapai 17 orang, sedangkan Golongan I dan II hanya sejumlah 1 orang atau.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkalis
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	1	1	2
2.	BID. PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN		1	3
3.	BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN		1	3
4.	UPT. DAMKAR KECAMATAN MANDAU			2
5.	UPT. DAMKAR KECAMATAN BUKIT BATU			2
6.	UPT. DAMKAR KECAMATAN RUPAT			1
7.	UPT. DAMKAR KECAMATAN PINGGIR			1
TOTAL		1	3	14

Sumber: Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis,
Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 18 jabatan di lingkungan Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dan UPT. Dari jumlah tersebut 18 jabatan pada kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis.

Komposisi PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	SEKRETARIAT	3	3	-	5	-
2.	BID. PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN KEBAKARAN	2	2	-	1	-
3.	BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL, SARANA PRASARANA DAN PENYELAMATAN PEMADAM KEBAKARAN	-	3	-	7	-
4.	UPT. DAMKAR KECAMATAN MANDAU	-	1	-	3	-
5.	UPT. DAMKAR KECAMATAN BUKIT BATU	-	2	-	3	-
6.	UPT. DAMKAR KECAMATAN RUPAT	1	-	-	-	-
7.	UPT. DAMKAR KECAMATAN PINGGIR	-	1	-	3	-
TOTAL		6	12	0	22	0

Sumber: Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d SMA yaitu sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang .

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3
Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mobil PTO	6	5	1	-	-
2	Mobil Tangki	3	3		-	-
3	Mobil Pick Up	7	-	3	-	-
4	Mesin Pemadam	10	10	5	-	-
5	Mesin Apung Pemadam	5	5	3	-	-
	TOTAL	31	23	12	-	-

Sumber: Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 33 asset Sarana Prasarana di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 15 asset memiliki kondisi yang baik. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 18. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat tidak ada. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

Di samping keberadaan asset tersebut di atas, seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap UPT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis terus berupaya mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik. Sampai saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dibantu oleh unit operasional pelayanan yang terdiri 4 UPT pendapatan Wilayah yang tersebar di Kabupaten Bengkalis.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/

kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Trantibumlinmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (3)	Satuan (4)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	1 (17)	2 (18)	3 (19)	4 (20)	5 (21)
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%				0.00	75.00	85.00	85.00	85.00	0.00	80.00	80.00	90.00	95.00	0.00	106.67	94.12	105.88	111.76
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%				0.00	15.00	35.00	50.00	65.00	0.00	37.47	37.47	37.47	37.47	0.00	249.80	107.06	74.94	57.65
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standart Kualifikasi	%				0.00	60.00	70.00	80.00	85.00	0.00	64.04	73.00	84.00	88.00	0.00	106.73	104.29	105.00	103.53
Persentase Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 - 5000 Liter pada WMK	%				0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	61.54	61.54	81.82	82.00	0.00	64.78	64.78	86.13	86.32

Figure 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bangkalis Tahun 2017-2020 Sebagian tercapai. Terdapat 2 (dua) indikator yang tercapai yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dan Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi realisasinya di atas melebihi target yang ditetapkan. Sementara Indikator yang tidak tercapai yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Persentase Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter pada WMK. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bangkalis dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan kapasitas Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dengan demikian, pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bangkalis dapat memenuhi Indikator Kinerja yang di tetapkan.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bangkalis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2017-2020 adalah sejumlah Rp. 19.005.267.274,00 (Sembilan belas milyar lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setara dengan 99,20% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 20.905.608.837,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus lima juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	Rp. 4.302.103.420,00	Rp. 3.774.937.441,00	87,75
2	2018	Rp. 4.604.923.276,00	Rp. 3.983.570.251,00	86,51
3	2019	Rp. 6.353.835.582,00	Rp. 5.899.061.017,00	92,84
4	2020	Rp. 5.644.746.359,00	Rp. 5.347.698.565,00	96,73
Jumlah		Rp. 20.905.608.837,00	Rp. 19.005.267.274,00	

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah optimal dengan predikat “sangat tinggi”.

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 45.522.829.274 (Empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 43.255.077.087,00 (Empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,00%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2017	Rp. 10.396.239.626,00	Rp. 9.446.497.376,00	97,43
2	2018	Rp. 11.302.530.000,00	Rp. 10.916.064.263,00	99,77
3	2019	Rp. 12.564.096.060,00	Rp. 12.316.645.035,00	98,24
4	2020	Rp. 11.259.963.588,00	Rp. 10.575.870.413,00	97,77
5	Jumlah	Rp. 45.522.829.274,00	Rp. 43.255.077.087,00	

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 2.267.752.187 (Dua

milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 62.260.344.361 (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2017 s/d 2020. Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,302,103,420	4.604.923.476	6.353.835.582	5.644.746.359	3.774.937.441	3.983.570.251	5.899.061.017	5.347.698.565	88,00	87,00	93,00	95,20		
	Belanja Pegawai	4.302.103.420	4.604.923.476	6.353.835.582	5.644.746.359	3.774.937.441	3.983.570.251	5.899.061.017	5.347.698.565	83,00	87,00	93,00	95,20		
	a. Gaji dan Tunjangan	1.748.643.420	2.165.553.476	2.822.757.582	2.697.465.271	1.769.227.441	2.035.426.051	2.516.320.017	2.415.772.477	99,20	94,00	95,00	96,30		
	b. Tambahan Penghasilan PNS	2.553.460.000	2.439.370.000	3.531.078.000	2.947.281.088	2.005.710.000	1.948.144.200	3.382.741.000	2.931.926.088	99,20	85,20	97,00	99,30		
II.	BELANJA LANGSUNG	10,396,239,626	11,302,530,000	12,564,096,060	11,259,963,588	9,446,497,376	10,916,064,263	12,316,645,035	10,575,870,413	90,00	97,00	98,00	99,00		
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	976.576.976	1.606.076.400	1.594.519.000	1.209.359.600	924.526.876	1.496.369.575	1.508.731.881	1.125.249.407	99,00	99,00	98,00	99,00		
(1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.998.000	66,600,000	62,400,000	7,503,000	41,598,000	66,600,000	61,000,000	7,503,000	83,00	100,00	98,00	100,00		
(2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	179.999.976	204,500,000	200,000,000	223,500,000	163,789,855	165,708,075	170,744,490	180,738,338	91,00	81,00	85,00	81,00		
(3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	17.500.000	60,000,000	58,000,000	58,000,000	13,963,950	12,297,100	11,023,010	19,148,558	80,00	20,00	19,00	33,00		
(4)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	93.650.000	198,655,000	198,590,000	180,030,000	93,650,000	198,655,000	198,590,000	180,030,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
(5)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.829.000	55,296,400	82,179,000	51,821,600	59,829,000	55,296,400	82,179,000	51,821,600	100,00	100,00	100,00	100,00		
(6)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.500.000	51,700,000	49,450,000	35,290,000	47,500,000	51,700,000	49,450,000	35,290,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
(7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000	80,225,000	61,300,000	36,015,000	22,500,000	80,225,000	61,300,000	36,015,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
(8)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	18.000.000	24,500,000	24,000,000	27,000,000	10,415,000	13,200,000	16,800,000	25,100,000	58,00	54,00	70,00	93,00		
(9)	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	15,000,000	15,000,000	12,000,000	14,200,000	13,075,000	14,255,000	11,525,000	47,00	87,00	95,00	96,00		
(10)	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	400,000,000	600,000,000	690,000,000	355,000,000	399,481,071	593,213,000	689,790,380	354,877,911	100,00	99,00	100,00	100,00		
(11)	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	57,600,000	153,600,000	153,600,000	172,800,000	57,600,000	152,000,000	153,600,000	172,800,000	100,00	99,00	100,00	100,00		
(12)	Penyediaan Jasa Supir Kantor	-	96,000,000	-	-	-	94,400,000	-	-	-	98,00	-	-		

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(13)	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-	50,400,000	-	-	-	50,400,000	-	-	-	100.00		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	607.861.850	1.512.700.000	2.166.140.000	950.225.978	432.619.600	1.404.457.50	2.083.577.000	770.806656	99,00	98,86	99,00	99,00		
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	137,499,600	118,440,000	192,000,000	104,560,000	104,470,000	88,440,000	172,684,000	90,054,700	76.00	75.00	90.00	86.00		
2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	57,362,250	183,560,000	161,240,000	83,392,000	57,350,000	171,831,800	159,654,000	82,652,000	100.00	80.00	99.00	99.00		
3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	105,000,000	748,500,000	1,350,000,000	284,200,000	93,500,000	738,620,000	1,321,610,000	283,696,000	89.00	94,89	98.00	100.00		
4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	248,000,000	413,700,000	407,900,000	448,073,978	150,360,600	372,175,000	378,208,000	284,397,956	61.00	90,00	93.00	63.00		
5.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung kantor	60,000,000	48,500,000	55,000,000	30,000,000	26,939,000	33,390,750	51,421,000	30,000,000	45.00	69.00	93.00	100.00		
6.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	Pengadaan Pakaian dan perlengkapan petugas	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	98.000.000	98.000.000	50.000.000	96.502.000	94.681.000	85.850.600	48.550.000	97.00	97,00	88.00			
1.	Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik Instansi Pemerintah	100.000.000	98,000,000	98,000,000	50,000,000	96,502,000	94,681,000	85,850,600	48,550,000	97.00	97.00	88.00	97.00		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	51,400,000	-	-	-	51.110.000	-	-	-	99,00		
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	-	-	-	51,400,000	-	-	-	51,110,000	-	-	-	99.00		
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.318.900.000	6.375.100.000	6.535.840.760	6.504.230.760	6.136.794.000	6.346.289.000	6.519.456.369	6.474.191.00	99,00	96,70	-	-		
1.	Pengendalian Keamanan Lingkungan dari bahaya kebakaran	6,289,700,000	6,337,300,000	6,497,230,760	6,504,230,760	6,110,286,000	6,315,231,000	6,486,763,560	6,474,191,000	97.00	100.00	100.00	100.00		
2.	Inventarisasi alat proteksi Damkar	29,200,000	37,800,000	38,610,000	-	26,508,000	31,058,000	32,692,809	-	91.00	82.00	85.00	-		
7.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	99.160.000	-	-	-	99.160.000	-	-	-	92,38	-	-	-		
1.	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar dan Hari Tertentu	99.160.000	-	-	-	99,160,000	-	-	-	100.00	-	-	-		
8.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	2.093.740.800	1.710.653.600	8.705.437.060	8.998.978.010	1.756.894.900	1.791.414.638	8.638.485.555	8.580.160.350	99,00	44,86	-	-		
1.	Pengadaan Perlengkapan kegiatan petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan	199,400,000	154,875,000	-	-	172,470,000	154,518,788	-	-	86.00	100.00	-	-		

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BENGKALIS**

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	659,834,000	592,033,500	527,714,600	400,600,000	494,255,100	482,534,140	505,342,286	270,960,000	75.00	82.00	96.00	68.00		
3.	Pengadaan Plang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan	99,400,000	49,993,300	-	-	98,978,500	48,857,300	-	-	100.00	98.00	-	-		
4.	Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	284,076,800	-	501,500,000	-	247,069,800	-	500,460,000	-	87.00	-	100.00	-		
5.	Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan	255,710,000	139,469,900	-	-	192,148,500	134,609,900	-	-	75.00	97.00	-	-		
6.	Bimbingan Teknis Penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan	100,000,000	148,000,000	235,000,000	55,000,000	97,266,000	146,286,000	230,700,200	19,000,000	97.00	99.00	98.00	35.00		
7.	Peningkatan Kapasitas Satuan pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Peningkatan Posko Karhutla	150,000,000	70,665,600	73,565,600	-	109,405,000	52,815,000	71,575,600	-	73.00	75.00	97.00	-		
9.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Mandau	150,000,000	-	221,492,900	272,750,000	149,982,000	217,147,500	217,147,500	212,420,350	100.00	-	98.00	78.00		
10.	Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian Karhutla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran (Penyelesaian utang pihak ketiga)	195,320,000	-	-	-	195,320,000	-	-	-	100.00	-	-	-		
12.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar	-	386,566,300	-	-	-	385,596,010	-	-	-	100.00	-	-		
13.	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Petugas lapangan (Penyelesaian utang pihak ketiga)	-	169,050,000	-	-	-	169,050,000	-	-	-	100.00	-	-		
14.	Pengendalian Keamanan lingkungan dari Bahaya kebakaran	-	-	6,497,230,760	6,504,230,760	-	-	6,486,763,560	6,474,191,000	-	-	100.00	100.00		
15.	Inventarisasi Alat Proteksi Damkar	-	-	38,610,000	53,000,000	-	-	32,692,809	44,650,000	-	-	85.00	84.00		
16.	Pembuatan Sistem Informasi Dinas DAMKAR Kab. Bengkalis	-	-	66,520,000	-	-	-	56,874,000	-	-	-	85.00	-		
17.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Pinggir	-	-	191,515,800	201,900,000	-	-	184,972,200	201,419,000	-	-	97.00	100.00		
18.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Rupa	-	-	172,743,700	316,937,500	-	-	172,513,700	316,937,000	-	-	100.00	100.00		
19.	Peningkatan Kapasitas UPT Damkar Kecamatan Bukit Batu	-	-	179,543,700	320,362,500	-	-	179,443,700	208,500,000	-	-	100.00	65.00		
20.	Penyuluhan, penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan bahaya kebakaran	-	-	-	40,750,000	-	-	-	34,686,000	-	-	-	60.00		
21.	Sosialisasi dan Bimtek Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bangunan bagi Masyarakat	-	-	-	68,950,000	-	-	-	37,315,000	-	-	-	54.00		
22.	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	-	-	-	764,497,250	-	-	-	760,082,000	-	-	-	99.00		

No.	Uraian	Anggaran tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Realisasi Tahun Ke- (dalam juta rupiah)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2017 s/d 2020.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya regulasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Dukungan perkembangan teknologi yang menunjang strategi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Adanya partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanganan penanggulangan kebakaran.

Adapun tantangan yang dapat dimanfaatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Luasnya cakupan wilayah potensi kebakaran
2. Banyaknya pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran.
3. Gedung dan Bangunan belum memenuhi standarisasi system proteksi penanggulangan kebakaran.
4. Akses jalan wilayah perumahan dan pemukiman memiliki jalur yang sempit.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.8
Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang penanganan, penanggulangan dan pencegahan dini tentang Kebakaran Bangunan / Gedung Karhutla	√	√	√	√	√
2.	Akurasi data kasus kebakaran harus di optimalkan	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan kualitas pemeriksaan Apar	√	√	√	√	√
4.	Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelamatan pemadam kebakaran	√	√	√	√	√
5.	Peningkatan kualitas pengendalian Operasional dan penyelamatan pemadam kebakaran	√	√	√	√	√
6.	Peningkatan Penanganan dan penyelamatan evakuasi terhadap bencana kebakaran	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah " **Masih rendahnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan** ", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan belum optimal dari seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
 - a) Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana kebakaran
 - b) Masih rendahnya kualitas database potensi wilayah kebakaran
 - c) Lemahnya kualitas pemeriksaan Apar
2. Permasalahan dalam Bidang Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelamatan pemadam kebakaran
 - b) Masih rendahnya standarisasi peralatan pemadam kebakaran
3. Permasalahan dalam Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
 - a) Masih rendahnya kualitas pengendalian Operasional dan penyelamatan pemadam kebakaran
 - b) Belum Optimalnya Penanganan dan penyelamatan evakuasi terhadap bencana kebakaran

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.
Kerangka Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis



Berdasarkan grafik di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut.

Table 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Tingkat Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana kebakaran • Masih rendahnya kualitas database potensi wilayah kebakaran • Lemahnya kualitas pemeriksaan Apar
Tingkat Kualitas Sarana	Masih Rendahnya Kualitas Sarana Prasarana Pemadam	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelamatan

Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Kebakaran dan Penyelamatan	<p>pemadam kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya standarisasi peralatan pemadam kebakaran
Tingkat Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas pengendalian Operasional dan penyelamatan pemadam kebakaran Belum Optimalnya Penanganan dan penyelamatan evakuasi terhadap bencana kebakaran

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan

indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dalam Sub Urusan Wajib Bidang Pelayanan Dasar, secara teknis diselaraskan dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia, yaitu Pelayanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Pelayanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang dimaksud adalah :

1. Layanan Response Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penanggulangan Kejadian Kebakaran
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)
5. Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Potensi Bencana Alam

Provinsi Riau sebagai wilayah teritorial yang secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis di posisi Timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia, serta dialiri 15 sungai yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian

masyarakat. Meskipun demikian, tidak berbeda halnya dengan wilayah Provinsi lainnya, Provinsi Riau juga rawan terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan. Bahkan kecenderungan kejadian bencana alam di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hampir sekitar 75% wilayah Provinsi Riau mengalami bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan. Disamping itu potensi bencana juga disebabkan oleh factor non alam/ulah manusia seperti kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Riau menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui potensi bencana sebagai berikut :

a. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu kejadian Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktifitas maupun kesehatan masyarakat, tidak hanya mereka yang tinggal di Wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi juga disekitarnya. Kabut asap yang menyesakan itu dipicu oleh pembakaran yang dilatar belakangi pemanfaatan huta dan lahan yang diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin.

Berdasarkan peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di ketahui bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan hampir merata di seluruh wilayah kabupaten bengkalis. Indeks bahaya kebakaran tertinggi hampir terdapat diseluruh wilayah kabupaten Bengkalis dan di beberapa tempat di Kabupaten lainnya. Selanjutnya Indeks bahaya kebakaran rendah sampai sedang memiliki penyebaran yang luas terutama terdapat di pegunungan lahan hutan rawa gambut.

b. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim merupakan salah satu bencanayang termasuk dalam Hazard Non SNI. Contoh bencana cuaca Ekstrim adalah angin puting beliung dan gelombang ekstrim. Bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki Indeks ancaman angin puting yang tinggi. Sedangkan

kejadian gelombang ekstrim dan abrasi menunjukkan indeks ancaman sedang sampai tinggi.

c. Kekeringan

Wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki kawasan yang mempunyai potensi kekeringan. Ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 kelas indeks ancaman, yakni rendah, sedang, dan tinggi di Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

d. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan suatu Fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mengalami perubahan secara pesat. Konflik akan timbul akibat dari perlawanan mental sebagai akibat dari kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang berlawanan, atau tindakan yang berlawanan karena ketidakcocokan/ ketidakserasian, dan berkelahi, berperang, atau baku hantam yang pada dasarnya sumber utama terjadinya konflik atau manusia.

Ketidakpuasan pemecahan masalah dari pihak yang tidak dapat dicegash akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatisme. Konflik sosial dapat terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi, hankam dan hukum.

Di Kabupaten Bengkalis, dalam 5 (lima) tahun terakhir ini banyak terjadi tuntutan masyarakat terhadap kepemilikan lahan, khususnya kasus tanah dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan dan sengketa tanah.

Kekurangberdayaan masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya., maupun antara masyarakat dengan pihak pihak yang menjadi bagian dari perubahan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan. Kesenjangan dalam akses sumberdaya Ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, Perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Bengkalis berpotensi menjadi sumber konflik sosial semacam itu.

Ancaman konflik sosial di Kabupaten Bengkalis telah di petakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis dapat dinyatakan bahwa hampir seluruh di Wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki Indeks ancaman konflik sosial yang rendah, walaupun demikian potensi konflik sosial di beberapa wilayah Kabupaten Bengkalis cukup besar seperti di desa – desa sekitar konsesi Perusahaan HTI dan Perkebunan. Oleh karen itu, kewaspadaan perlu terus dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial yang luas.

Memperlihatkan beberapa ancaman kebakaran dan Bencana lainnya yang terdapat di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya dalam situasi Tidak terjadi Bencana meliputi :

1. Perencanaan Penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
2. Pengenalan dan Pemantauan Peringatan Dini
3. Pengurangan resiko Bahaya kebakaran dan Bencana lainnya
4. Pencegahan bahaya kebakaran dan Bencana lainnya
5. Pemantauan dan Perencanaan Pembangunan
6. Persyaratan Analisis Resiko Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya
7. Pelaksanaan dan Penegkaan Rencana Tata Ruang Wilayah
8. Pendidikan dan Pelatihan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya.
9. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Bencana Non Alam berupa kabut asap menjadi fenomina setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan Dunia

usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.

2. Regulasi untuk percepatan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum mendukung, baik untuk kegiatan Operasional maupun pencairan dana siap Pakai (DSP).
3. Sistem Peringatan dini bencana alam (early warning system) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada.
4. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu “**Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Prima**”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 1 (satu) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		: Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera						
Misi ke-II RPJMD		: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

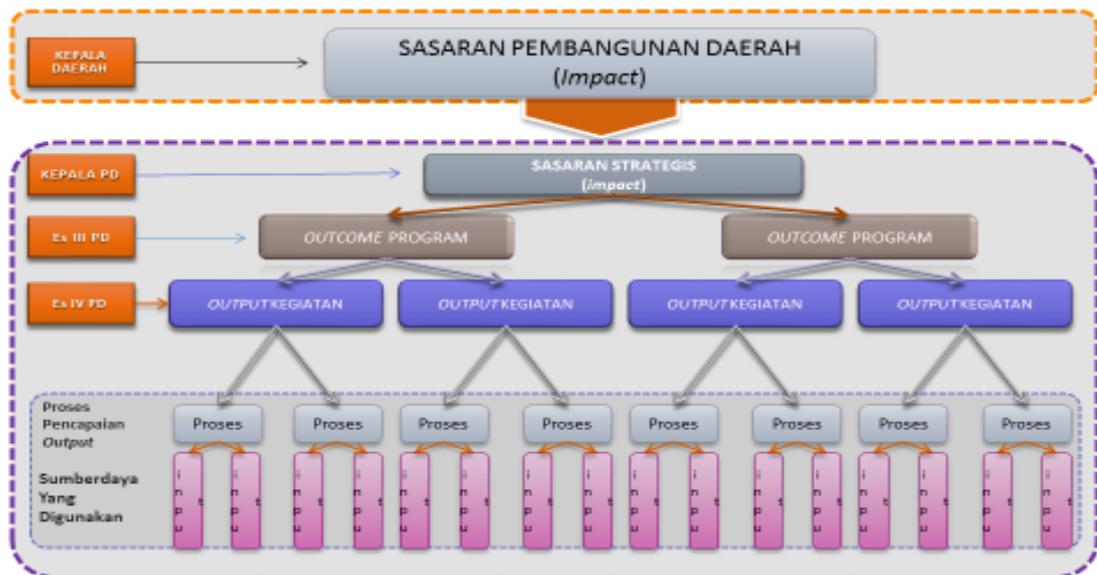
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan yang lebih efektif dan efisien	1. Optimalisasi Sosialisasi dan simulasi Pencegahan Kebakaran
		Peningkatan sistem pengawasan	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran
		Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberi akses yang cepat dan nyaman serta segala bentuk informasi yang transparan dan akuntabel. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pengawasan dalam menghadapi bencana kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

3. Investigasi Kejadian Kebakaran

- a. Investigasi Kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Rincian Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan
Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Prima	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)	100%			Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bengkalis	
			1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)	100%				
			Sub Kegiatan : a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan yang tersedia	1 Laporan				
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)	100%				
			Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	100%				
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)	100%				
			a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun	9 orang				
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan layanan administrasi kantor (Umum dan Kepegawaian)	100%				
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN memahami pelaksanaan peraturan perundangan	12 orang							
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana termasuk Pemeliharaan	100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 item				
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun, umlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	54 item : 44 item				
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Box/Porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan ang disediakan	400 Box				
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	8 item				
			e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah tertibatan surat kabar/majalah/buku peraturan undang undang yg disediakan dalam 1 (satu) tahun	19 eksamplar				
			f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah pada 1 (satu) tahun	50 kali				
			5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%				
			a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional pemadam yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	5 unit				
			b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun ; jumlah perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pekerjaan	13 item				
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Admininstrasi Kantor (umum dan kepegawaian)	100%				
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 (satu) tahun : jumlah tenaga	1 tahun : 5 orang				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
						Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				administrasi perkantoran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun					
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan jasa listrik yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun				
			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga supir yang tersedia dalam 1 (satu) tahun	1 orang				
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan	100%				
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	9 unit				
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ pemadam yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun	9 unit				
			c. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	9 orang				
			d. Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun : persentase peralatan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun	100% : 100%				
			2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase terlaksananya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%				
			1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terlaksananya pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	100%				

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Sasaran (3)	Program dan Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) (5)	Kondisi Awal (6)	Kondisi Akhir		Unit Kerja Penanggung Jawab (9)	Lokasi Kegiatan (10)
						Target (7)	Rp (8)		
				kabupaten/kota					
			a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah cakupan wilayah operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan kabupaten bengkalis ; jumlah personil dalam keamanan lingkungan 233 orang	100%				
			b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan (Rescue)	100%				
			c.Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas yang mendapat diklat	4 orang				
			2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase terlaksananya peralatan proteksi kebakaran	100%				
			a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pelayanan alat proteksi pemadam kebakaran pada bangunan gedung	3200 APAR				
			3. Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	100%				
			a. Investigasi Kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Tersedianya data kejadian kebakaran	11 kecamatan				
			4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%				
			a. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuknya relawan pemadam kebakaran	75 orang				
			Grand Total						

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan Kualitas dan Kuantitas yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100	100	100	100	100	

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat satu indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah (Nomor 1)

Formula Perhitungan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun yang sama}} \times 100\%$ $+$ $\frac{\text{Jumlah Layanan Pemadaman di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam Tingkat Waktu Tanggap (respon time) oleh Relawan Kebakaran yang Dibentuk dan/atau Dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun yang sama}} \times 100 \%$

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, dimana bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BENGKALIS

SYAFRIZAN, S.Si, MT, M.Sc.
Pembina Tk. I
NIP. 19741024 200003 1 004